

TENAGA KERJA WANITA: PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh

Pranowo

Abstrak

Jumlah penduduk berkelamin wanita saat ini sudah tercatat melebihi pria. Namun, keterlibatan mereka dalam pembangunan ekonomi masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan pria. Mengingat bahwa desakan kebutuhan pembangunan, tampaknya peran wanita dalam pembangunan ekonomi terasa perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan peran tenaga kerja wanita di Indonesia baik dalam pencatatan Produk Nasional Bruto (PDB) maupun tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Memang secara konsisten partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi itu bertambah; sehingga diharapkan pada tahun 1998 kelak tingkat partisipasi angkatan kerja wanita ini mencapai 50,9% sesuai dengan proporsi jumlah wanita terhadap pria yang ada selama ini.

Ada beberapa kendala yang menghambat upaya untuk mencapai hal tersebut sebab adanya perbedaan perlakuan -terutama di sektor swasta- terhadap tenaga kerja wanita dan pria. Di samping itu, ada pula kendala lain yang menghambat, yaitu rendahnya pendidikan angkatan kerja wanita dan jam kerja yang dapat dialokasikannya untuk bekerja di luar rumah itu "relatif" rendah. Perihal jam kerja bagi angkatan kerja wanita ini memang agak merepotkan. Sesuai dengan kodratnya sebagai wanita, maka ia harus melahirkan anak dan bertugas sebagai ibu rumah tangga. Oleh karenanya, ada sejumlah angkatan kerja wanita yang memilih jam kerja pendek selama mereka bekerja di luar rumah karena pertimbangan-pertimbangan di atas.

Latar Belakang

Berbicara tentang tenaga kerja wanita (TKW), kita cenderung mengundang sinisme berlebihan. Sebab, selama ini TKW mendapat konotasi sebagai tenaga kerja kasar, berpendidikan rendah dan biasanya berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kerumahtangga. Sangat mungkin kesan negatif terhadap TKW ini terjadi karena selama ini TKW berkonotasi

dengan pembantu rumah tangga, atau *baby siter*. Mereka ini dalam percaturan dunia perburuhan di Indonesia dikenal sebagai tenaga kerja lapisan bawah. Namun, dalam pembicaraan kali ini TKW akan diperluas dimensinya, tidak hanya tenaga kerja lapisan bawah, namun juga yang berada di lapisan menengah ke atas.

Wanita, yang merupakan bagian integral masyarakat Indonesia, mulai mendapat perhatian khusus sejak Pelita III. Berdasarkan GBHN 1978, peranan wanita mulai dibahas secara khusus. Pada GBHN 1983 pembahasan tentang peranan wanita ini menjadi semakin intens. Hal ini memberikan petunjuk bahwa peran serta wanita yang secara aktif terlibat dalam kehidupan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan nasional mutlak diperlukan (Kesra, 1988).

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, terutama di dalam era pembangunan, potensi peranan wanita menjadi sangat penting. Bahkan, jika mungkin, peranan mereka harus ditingkatkan. Sebab, betapa pun juga wanita saat ini kedudukannya sudah menjadi semakin baik. Perkembangar ekonomi menuntut wanita harus duduk sejajar dengan pria ketika membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan ekonomi. Namun, jika ditelusuri pada UUD 1945, tidak ada satu patah kata pun yang menyinggung secara eksplisit mengenai peranan wanita ini. UUD 1945 tidak membedakan secara eksplisit peranan antara pria dan wanita. Jika kemudian disimak pasal-pasal 26, 27, 29, 30, dan 31 dari UUD 45 itu maka yang dijumpai adalah kata-kata warga negara, tiap warga negara dan penduduk. Perbedaan gender pria-wanita, tidak dimunculkan secara eksplisit baik dalam batang tubuhnya sendiri maupun dalam penjelasannya. Ini bisa ditafsirkan bahwa UUD 1945 memberi kesempatan yang sama antara pria dan wanita dalam mengoperasikan berbagai kegiatan dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pada landasan berpijak yang cukup mapai tersebut, maka rintisan yang dilakukan sejak GBHN 1977 yang menyatakan secara eksplisit peranan wanita dalam pembangunan ekonomi perlu diteruskan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, perlu diupayakan pula untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bahwa kedudukan wanita baik dalam masyarakat, hukum, ekonomi, politik dan berbagai bidang lainnya itu tidak berbeda dengan pria. Walaupun demi

kian, harus pula disadari bahwa masing-masing pihak, baik pria maupun wanita, mempunyai kekurangan. Dengan kesadaran yang tinggi dan pengarahannya yang mantap maka segala kekurangan serta keterbelakangan dalam berbagai bidang dapat dikejar dan dipenuhi. Dengan demikian, peranan wanita dalam pembangunan akan merupakan sebuah kenyataan dan bukan sekedar impian (Harjito Notopuro, 1992).

Peranan wanita dalam kegiatan ekonomi tampak dari keinginan mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja dalam sektor-sektor ekonomi yang ada. Adanya wanita yang bekerja mencari nafkah tersebut tentunya didorong oleh berbagai faktor tertentu. Salah satu faktor pendorong yang dikemukakan oleh Dochak Latief (1990) adalah meringankan beban suami dan mencari kesibukan sementara anak-anak sudah menjadi semakin dewasa. Secara makro, keterlibatan wanita di bidang ekonomi menunjukkan adanya tambahan "supply" tenaga kerja yang berada di pasar tenaga kerja (Gordon, 1987:416). Dari sisi ini terlihat bahwa persaingan untuk memperoleh kesempatan kerja menjadi semakin sengit. Namun, di pihak lain persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja ini akan menyebabkan harga jual (upah kerja) cenderung menjadi lebih murah (Leftwich, 1957:19).

Kondisi Pekerja Wanita Saat Ini

Menurut Tambunan (1992), tenaga kerja wanita (TKW) adalah bagian dari penduduk yang secara ekonomis potensial untuk terjun ke dalam pasar tenaga kerja dan bertindak sebagai angkatan kerja. Dengan demikian, tidak lagi dapat dibedakan atas dasar gender, ketika seseorang sudah berada dalam jajaran pasar tenaga kerja. Secara makro, maka setiap orang yang berada dalam jangkauan pasar tenaga kerja, baik pria maupun wanita, akan bersaing ketat untuk memperoleh pekerjaan. Mengingat bahwa dalam jenjang pendidikan saat ini antara pria dan wanita mempunyai kesamaan hak dan kesempatan kerja juga menjadi semakin terbuka bagi wanita, maka partisipasi TKW terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita baru 23,65%, sementara pada tahun 1985 menjadi 39,5% dan pada tahun 1987 angka itu membengkak menjadi 44,63%. Proporsi angkatan kerja wanita ini secara relatif

semakin meningkat dari waktu ke waktu seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1
Komposisi angkatan kerja Indonesia menurut gender (dalam %)

Gender	1988	1993	1998
Wanita	37,4	38,8	40,2
Laki-laki	62,6	61,2	59,8

Sumber: BPS, Proyeksi angkatan kerja 1988 - 2000

Atas dasar angka partisipasi yang terus meningkat tersebut, diperkirakan bahwa proporsi angkatan kerja juga akan meningkat dari 37,4% pada tahun 1988 menjadi 40,2 pada tahun 1998. Angka ini menunjukkan bahwa pada akhirnya angka-angka tersebut akan mendekati titik proporsional perbandingan wanita-pria sebesar 50,3 seperti yang ada saat ini. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa ada kecenderungan bagi wanita untuk berperan lebih besar dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Mengutip pendapat Meier bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses bertambahnya pendapatan riil masyarakat dalam jangka panjang (Pranowo, 1978:45), maka sebenarnya adalah bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat merupakan obsesi yang sangat kuat. Oleh karena itu, maka pembangunan ekonomi dijadikan titik berat pembangunan jangka panjang. Namun, pembangunan ekonomi bukanlah satu-satunya obsesi. Bidang-bidang lain, misalnya sosial, budaya, pendidikan, dan politik akan pula digarap bersama agar ada keseimbangan.

Landasan hukum pembangunan ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 itulah maka GBHN menggariskan bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada demokrasi ekonomi. Artinya, masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut secara aktif. Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun mereka harus diletakkan sebagai subjek. Ini artinya, pemerintah meletakkan manusia Indonesia dalam proporsi yang sebenarnya. Namun, secara operasional dasar-dasar pembangunan

ekonomi Indonesia justru diletakkan oleh H. Samanhudi dengan *Sarekat Dagang Islam*-nya pada permulaan abad 20 (Pranowo, 1992). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan, bimbingan dan berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha (Erningsih, 1992:4).

Masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam proses perubahan. Perubahan yang terjadi saat ini adalah pergerakan dari sistem ekonomi agraris ke sistem ekonomi industri yang sepenuhnya berpedoman pada mekanisme pasar. Perubahan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi, struktur dan jenis tenaga kerja yang diperlukan. Hal ini di kelak kemudian hari akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kebutuhan akan tenaga kerja profesional baik pria maupun wanita.

Berkaitan dengan perubahan struktural tersebut, maka lapangan kerja profesional bagi kaum wanita ikut bertambah. Dari sini mulai terlihat peranan TKW dalam percaturan pembangunan ekonomi tersebut. Untuk dapat melihat peranan tenaga kerja wanita (TKW) bisa dideteksi dari partisipasi mereka. Sebagai ilustrasi, ketika orientasi masyarakat Indonesia masih berkisar pada dunia agraris, maka pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita lebih banyak berkaitan dengan kegiatan sektor agraris itu. Namun, ketika orientasi kegiatan ekonomi sudah beralih ke industri, maka banyak lapangan-lapangan kerja profesional yang bisa dimasuki kaum wanita; misalnya konsultan, sekretaris, *public relation*, dokter, ahli teknik, akuntan, ahli hukum dan sebagainya. Pada periode belakangan ini terasa banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat cocok bila dikerjakan oleh tangan-tangan wanita. Pekerjaan-pekerjaan seperti yang disebut terakhir ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kelancaran komunikasi verbal, kecepatan manual, ketepatan pengerjaan, daya ingat yang lebih tajam, dan kehangatan yang bersifat mengasuh yang kesemuanya itu merupakan kelebihan dari wanita jika dibandingkan dengan pria (Erningsih, 1992:4).

Untuk melihat tingkat partisipasi tenaga kerja wanita perlu kiranya dinyatakan secara eksplisit pengertian angkatan kerja itu. Definisi angkatan kerja yang akan digunakan di sini adalah pengertian angkatan kerja berdasarkan sensus pendu-

duk 1980. Dalam hal ini dinyatakan bahwa angkatan kerja adalah mereka yang telah berusia 10 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah. Sedangkan pengelompokan tenaga kerja wanita dibagi menjadi wanita yang termasuk angkatan kerja (*economically active*), yaitu wanita yang bekerja di luar pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga dan wanita yang bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang hanya terlibat dalam kegiatan rumah tangga.

Seandainya konsepsi angkatan kerja wanita itu meliputi pula kegiatan mengurus pekerjaan rumah tangga, akan dijumpai bahwa jumlah angkatan kerja wanita akan memiliki proporsi yang sama besar bahkan mungkin lebih bila dibandingkan dengan tenaga kerja pria. Untuk memberikan gambaran tingkat partisipasi tenaga kerja wanita, berikut ini ditampilkan tabel berkenaan dengan hal di atas.

Tabel 2

Penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan di daerah pedesaan berdasar sensus penduduk 1980
(dalam jutaan jiwa)

Golongan Penduduk	Jumlah	Angkatan Kerja	Mengurus rumah tangga	Jumlah seluruhnya
Wanita (10 tahun ke atas)	41,0	14,2 (34,6%)	16,5	30,7 (74,9%)
Laki-laki (10 tahun ke atas)	39,4	11,8 (70,6%)	0,5	38,3 (71,6%)
Laki-laki + Wanita (10 tahun ke atas)	80,4	42,0 (52,3%)	17,0	59,0 (73,4%)

Sumber: BPS, Penduduk Indonesia seri 9, no.1

Jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja seluruhnya sebesar 80,4 juta jiwa; sementara jumlah yang terserap di sektor tenaga kerja ada sebesar 73,4%. Selebihnya ada yang menganggur dan ada pula yang masih berada di bangku sekolah. Jika kemudian dipisahkan jumlah tenaga kerja wanita yang sudah siap memasuki pasar tenaga kerja, maka jumlahnya ada sebesar 41 juta jiwa. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pria yang hanya 39,4 juta. Dari sisi ini terlihat bahwa tenaga kerja

wanita mempunyai proporsi sebesar 51,0%, sementara angkatan kerja pria hanya 49% saja. Namun, jumlah angkatan kerja wanita sebesar ini tidak seluruhnya masuk ke pasar tenaga kerja karena hanya 34,6% saja yang termasuk kategori angkatan kerja (*economically active*), sedang selebihnya lebih memilih sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya utamanya adalah mengurus kegiatan-kegiatan rumah tangga dan keluarga.

Partisipasi TKW dalam Kegiatan Ekonomi

Pada tahun-tahun terakhir terjadi kecenderungan bahwa hampir separuh dari penduduk wanita dalam kelompok usia kerja masuk dalam pasar kerja. Tidak diketahui dengan tepat berapa besar kontribusi tenaga kerja wanita ini dalam kegiatan ekonomi sebab data statistik yang tersedia sangat terbatas. Keadaan tersebut disebabkan antara lain oleh banyaknya tenaga kerja wanita yang bekerja di sektor informal atau sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Banyak pula mereka ini yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan paruh waktu (*part time*) atau sebagai pekerja musiman. Menurut sensus penduduk 1980 dan Supas 1985 yang dilakukan oleh BPS ada penurunan partisipasi angkatan kerja wanita kelompok usia muda 10 - 14 tahun dan 15 - 19 tahun pada periode 1980 sampai 1985. Keadaan itu disebabkan oleh peningkatan jumlah wanita di luar angkatan kerja karena mereka bersekolah. Kondisi ini biasanya ditunjukkan oleh adanya penurunan angkatan kerja wanita di perkotaan. Dari sisi ini bisa dinyatakan bahwa ada kesempatan untuk bersekolah yang lebih luas bagi para wanita, terutama, di daerah perkotaan.

Jika kemudian dilihat pada tingkat partisipasi tenaga kerja di daerah pedesaan, maka sangat boleh jadi penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pergerakan penduduk (urbanisasi) dari desa ke kota. Hal ini disebabkan oleh makin berkurangnya kesempatan kerja yang ada di pedesaan karena makin menyempitnya lahan pertanian. Mereka-mereka yang berurbanisasi ini diperkirakan memasuki sektor informal (sebagai buruh, pedagang kaki lima, pengecer/asongan, dan lain sebagainya), atau bekerja di pabrik-pabrik atau mungkin juga sebagai pembantu rumah tangga.

Berdasarkan sensus penduduk 1980, jumlah tenaga kerja wanita (penduduk wanita berusia 10 tahun ke atas) ada sebesar 53 juta orang, tetapi hanya 17,2 juta jiwa (32,4%) yang dinyatakan aktif dalam kegiatan ekonomi dalam arti kata mereka aktif bekerja untuk memperoleh sejumlah penghasilan. Dari angka itu diperoleh pula keterangan bahwa dari sisa penduduk wanita usia kerja yang sebesar 35,8 juta jiwa itu yang 21,7 juta jiwa (41%) dinyatakan sebagai ibu rumah tangga (Sribudiyanti, dkk., 1987).

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun mengurus pekerjaan rumah tangga itu tidak menghasilkan sejumlah uang, namun kenyataannya pekerjaan itu memberi dukungan bagi anggota keluarga lain yang bertugas sebagai pencari nafkah. Daya dukung ibu-ibu rumah tangga ini memang sangat diperlukan agar kepala keluarga dan anggota keluarga pencari nafkah lainnya itu bisa tenang dalam bekerja dan bisa berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya. Oleh karenanya, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ini perlu didudukkan pada tempat yang wajar. Artinya, pekerjaan mengurus rumah tangga ini harus dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Jika hal ini diterima, maka akan diperoleh kenyataan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja wanita jauh lebih besar dari angka 40% tersebut.

Peningkatan angka tingkat partisipasi angkatan kerja wanita tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya partisipasi tenaga kerja wanita dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Meskipun demikian, penurunan angka tingkat partisipasi tenaga kerja wanita yang terjadi pada tahun-tahun tertentu sebagaimana disebutkan di muka dan terjadi pada kelompok umur tertentu dipandang sebagai *under estimation* belaka. Sebab, mereka ini memasuki bangku sekolah atau bermigrasi ke kota. Jika angka tingkat partisipasi angkatan kerja wanita ini dikalikan dengan jumlah penduduk wanita pada kelompok usia yang bersangkutan, maka akan diperoleh jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja (*economically active*)

Partisipasi tenaga kerja wanita terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) pada tahun 1980 dan 1985 terlihat "relatif masih kecil. Hasil perhitungan BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1980 sumbangan TKW pada PDB hanya sebesar 9,8%. Sumbangan ini meningkat pada tahun 1985 menjadi 10,9%. Walaupun demikian, bisa dinyatakan di sini bahwa dalam

kurun waktu lima tahun itu TKW telah memberikan sumbangan yang sangat berarti. Hal ini diduga disebabkan oleh (Erningsih, 1992:6).

1. meningkatnya kualitas TKW
2. meningkatnya kebutuhan TKW, dalam arti terbuka lebih banyak kesempatan kerja bagi TKW
3. karena didesak oleh kebutuhan keluarga yang pada gilirannya memaksa ibu-ibu rumah tangga memasuki dunia kerja komersial.

Kendala-kendala yang Dihadapi Tenaga Kerja Wanita

Keikutsertaan TKW di dalam pembangunan ekonomi bukan berarti tanpa kendala. Banyak kendala-kendala yang membatasi gerak mereka untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

- a. Posisi wanita dalam rumah tangga. Posisi wanita dalam rumah tangga sangat bergantung pada komposisi, struktur dan organisasi rumah tangga itu sendiri. Dalam tulisan ini diasumsikan bahwa organisasi rumah tangga akan mempengaruhi pula partisipasinya di pasar tenaga kerja. Pengaruh dari status perkawinan mereka adalah kondisi utama yang diperkirakan akan menghambat supply tenaga kerja wanita di pasar tenaga kerja. Sebagai wanita diharapkan bisa bertanggung jawab pada keluarga; maka jika wanita bekerja di luar rumah maka wanita tersebut harus menyesuaikan pola kerjanya dengan pola pembagian kerja yang berlaku dalam rumah tangganya. Sistem dan pola pembagian kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan masyarakat terhadap lingkungannya (Paz, 1992:23). Pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja di luar rumah ada yang negatif, yakni tidak membolehkan wanita bekerja setelah menikah atau mempunyai anak. Kalau toh mereka ini bekerja lebih banyak disebabkan oleh desakan ekonomi keluarga. Dalam arti kata penghasilan keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kategori yang terakhir ini akan terjadi kemungkinan bahwa wanita bekerja pada posisi marginal dalam struktur pasar kerja artinya bahwa wanita tersebut bekerja pada jenis pekerjaan yang bersifat tradisional, terkonsentrasi pada struktur

- pekerjaan yang rendah, produktivitasnya rendah, dan akibatnya upah mereka juga rendah.
- b. Para pengusaha lebih suka memperkerjakan tenaga kerja laki-laki. Sikap pengusaha ini akan mempengaruhi pula prioritas dalam penerimaan pekerja, struktur upah dan jenis pekerjaan. Sikap pengusaha yang demikian itu diperkirakan akan menimbulkan asumsi bahwa TKW kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, TKW mempunyai angka absensi tinggi karena haid, melahirkan, dan sebagainya dan sering mengajukan permohonan pindah karena alasan perkawinan. Pandangan semacam ini akan mengurangi minat pengusaha untuk memperkerjakan TKW meskipun mereka ini adalah bagian dari *human investment*.
 - c. Adanya pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa lelaki adalah tiang utama keluarga. Oleh karenanya, timbul anggapan bahwa wanita hanya akan bekerja "sementara" waktu, yaitu apabila penghasilan suami sudah tidak mencukupi atau berkurang karena satu dan lain hal.

Dibandingkan dengan pria, produktivitas TKW relatif rendah (Hetifah Syaifudin, 1992:58) terutama jika ditinjau dari sisi pendidikan dan jam kerja. Kedua faktor tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap produktivitas; bahkan juga terhadap penghasilan. Pada tahun 1985 dari seluruh wanita yang bekerja (22,5 juta orang) yang berpendidikan maksimal SD sebanyak 89,33%. Sedangkan untuk pria jumlahnya hanya sebesar 80,59%. Mereka yang tidak pernah sekolah sama sekali, untuk wanita, ternyata persentasenya masih cukup besar, yaitu 33,54%; sementara untuk pekerja pria yang tidak sekolah sama sekali hanya sebesar 15,05%. Sementara itu, dari sisi jam kerja, jumlah wanita yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu juga masih cukup tinggi, yaitu sebesar 55,02%; sementara untuk pria hanya 33,12%. Gejala ini cukup menarik untuk diamati. Sebab, betapapun juga di level paling bawah ini terdapat perlakuan yang berbeda antara wanita dan pria, sementara untuk level menengah dan atas hal itu sudah semakin tipis perbedaannya. Untuk memperoleh gambaran selengkapnya periksa tabel berikut ini.

Tabel 3
Angkatan kerja diperinci berdasar
jenis kelamin dan jam kerja, 1985

Jam kerja per minggu	Wanita (%)	Pria (%)	Jumlah (%)
Sementara tak bekerja	2,44	1,22	1,66
01 - 09	5,74	2,06	3,39
10 - 24	30,13	14,61	20,20
25 - 34	19,15	16,45	17,43
35 - 44	21,50	28,41	25,91
45 - 59	12,71	27,37	22,09
60 - ke atas	8,33	9,88	9,32
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Supas 1985

Jika boleh digunakan bahasa *under employment* yang menunjukkan bahwa ada sejumlah pekerja yang bekerja di bawah 40 jam per minggu (Lim Yin An, 1991:45) maka jumlah pekerja wanita yang termasuk kategori *under employed* itu cukup besar. Lebih dari 50% angkatan kerja wanita itu *under employed*. Mereka ini adalah golongan penganggur tersembunyi. Mereka yang bekerja selama 10 - 24 jam per minggu atau sekitar 2 - 4 jam per hari jumlahnya cukup besar. Para pekerja wanita yang bekerja pada jumlah jam kerja sebesar itu ternyata berjumlah 30,13%, sementara jumlah pekerja pria hanya sebesar 14,61%. Sementara itu, jumlah pekerja wanita yang bekerja penuh selama 60 jam per minggu atau lebih hanya 21,04% saja. Dibandingkan dengan para pekerja pria, jumlah ini relatif lebih kecil. Sebab, pekerja pria yang bekerja penuh 60 jam per minggu atau lebih ada sebesar 37,25%.

Rendahnya jam kerja wanita ini sangat mungkin mereka bekerja paruh waktu (*part time*) atau bekerja sambil-an. Dengan demikian, produktivitas mereka juga menjadi sangat rendah. Rendahnya produktivitas ini diduga disebabkan oleh (Erningsih, 1992:8):

1. nilai sosial budaya yang kurang mendorong wanita untuk menuntut pendidikan setinggi-tingginya.

2. fungsinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga wanita lebih memilih jam kerja pendek-pendek saja.

Rendahnya produktivitas TKW ini pada gilirannya akan berpengaruh pula pada rendahnya penghasilan TKW. Data Supas 1976 menunjukkan bahwa penghasilan rata-rata TKW selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan tenaga kerja pria; bahwa pada tingkat pendidikan yang sama pun, penghasilan tenaga kerja wanita lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja pria. Ini berlaku terutama untuk pekerja wanita yang bekerja di perusahaan swasta. Sementara itu, mereka yang bekerja di sektor pemerintah perbedaan penghasilan antara pria dan wanita lebih banyak disebabkan oleh jenjang kepangkatan, tanggungan keluarga, dan masa kerja. Pada tingkat pendidikan yang sama, jenjang kepangkatan, jumlah tanggungan keluarga dan masa kerja yang sama, maka tidak akan ada perbedaan penghasilan antara pria dan wanita. Untuk memperjelas persoalan, maka tabel berikut ini disajikan.

Tabel 4
Pendapatan rata-rata*) per bulan pekerja pria dan wanita
diperinci menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	Wanita (Rp)	Pria (Rp)
Tidak bersekolah	2.958	4.759
Tidak tamat SD	5.576	6.764
Tamat SD	6.436	7.679
Tamat SLTP	8.077	8.974
Tamat SLTA	16.164	17.039
Sarjana Muda	36.422	37.012
Sarjana	53.805	55.439

Sumber: Supas 1976. Diolah oleh Pudjiwati Sajogyo. Dikutip sebagian.

*) pekerjaan di sektor swasta

Bagi yang tidak bersekolah sama sekali, penghasilannya ternyata sangat rendah. Walaupun demikian, pekerja wanita memperoleh gaji hanya hampir separuhnya saja dibandingkan dengan gaji pria. Makin tinggi tingkat pendidikannya, maka perbedaan penghasilan ini makin kecil. Namun, secara keseluruhan terlihat dari tabel di atas terlihat bahwa penghasilan

pekerja wanita lebih rendah dibandingkan dengan pekerja pria.

Melihat gambaran produktivitas TKW seperti di atas, jelaslah bahwa masalahnya tidak hanya sekedar penyediaan kesempatan kerja guna menampung partisipasi angkatan kerja yang terus meningkat. Tetapi juga masalah peningkatan partisipasinya dalam pasar tenaga kerja dapat produktif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas TKW, yaitu:

a. Mutu tenaga kerja

Mutu di sini tidak hanya diukur melalui tingkat pendidikan, keahlian atau keterampilan tenaga kerja saja, tetapi juga sikap mental, disiplin, motivasi kerjanya, serta gizi dan kesehatannya.

b. Lingkungan dan kondisi kerja

Hal ini meliputi sarana produksi dan teknologi, upah dan jaminan sosial serta keamanan. Perbaikan lingkungan dan kondisi kerja dapat melalui peningkatan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, penyediaan sarana yang memadai, perbaikan sistem pengupahan dan jaminan sosial paling sedikit harus mencukupi kebutuhan fisik minimum dan sebagainya. Sedangkan untuk TKW yang bekerja di luar hubungan kerja (sebagai wiraswasta, misalnya) perbaikan lingkungan dan kondisi kerjanya terutama melalui penyuluhan, bimbingan dan konseling untuk peningkatan kesadaran serta kemampuan memperbaiki lingkungan dan kondisinya sendiri.

c. Manajemen

Manajemen adalah supra sistem yang sangat mempengaruhi berkembangnya mutu tenaga kerja serta lingkungan dan kondisi kerja yang mendukung peningkatan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas TKW bisa dilakukan melalui perbaikan manajemen. Hal ini, terutama, ditujukan kepada TKW yang bekerja dalam hubungan kerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan manajemen partisipatif, yaitu sistem manajemen yang memberikan kesempatan luas kepada tenaga kerja untuk berperan aktif dalam proses produksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengembangkan sistem pengendalian mutu terpadu (*Total Quality Control/TQC*).

Sistem ini memberi hasil yang baik. Dan saat ini sudah

banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan.

Bagi TKW yang bekerja di luar hubungan kerja, mengaplikasikan manajemen untuk meningkatkan produktivitas kerja dilakukan dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung berkembangnya usaha-usaha mereka itu. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya-upaya untuk menyediakan bahan (baik bahan baku maupun bahan penolong), proses produksi, dan membantu pemasarannya. Ada pula baiknya memberikan perlindungan kepada usahanya dan ikut serta menjaga kelangsungan (kontinuitas) usahanya.

Upaya Pemerintah

Implikasi peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita bagi pembangunan ekonomi adalah penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi wanita. Dalam hal ini wanita lebih beruntung dibandingkan dengan pria karena pada tahun 1985 tingkat pengangguran wanita hanya 2%, sedang tingkat pengangguran pria ada sebesar 2,2%. Ini dapat diartikan bahwa kesempatan kerja bagi wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh angkatan kerja baik pria maupun wanita adalah terbatasnya kesempatan kerja tersebut di atas. Secara nasional, untuk mengatasi masalah tersebut telah digariskan dalam GBHN dan Repelita melalui kebijaksanaan umum, sektoral, pembangunan daerah dan kebijaksanaan khusus. Penjelasan dari masing-masing kebijaksanaan itu adalah sebagai berikut *).

1. Perluasan kesempatan kerja melalui kebijaksanaan umum berarti perluasan kesempatan kerja melalui kebijaksanaan lain seperti kebijakan moneter, fiskal, ekspor-impor, investasi, pengembangan iptek, dan sebagainya.
2. Perluasan kesempatan kerja melalui kebijaksanaan sektoral berarti menempatkan aspek perluasan kesempatan kerja sebagai salah satu tujuan dari setiap program pembangunan sektoral. Hal ini mengingat perluasan kesempatan kerja adalah bagian integral dari pembangunan di semua sektor, terutama sektor-sektor yang berada dalam lingkup bidang ekonomi, misalnya pertanian, industri, perhubungan, konstruksi, perdagangan, jasa, dan sebagainya.

*) periksa Tap MPR no.II/MPR/1988 tentang GBHN

3. Perluasan kesempatan kerja melalui kebijaksanaan pembangunan daerah, berarti pemerataan pembangunan di daerah untuk memperluas kesempatan kerja yang disesuaikan dengan potensi kemampuan dan kebutuhan.
4. Perluasan kesempatan kerja melalui kebijaksanaan khusus berarti adanya kebijaksanaan dan program-program yang khusus ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja bagi kelompok-kelompok angkatan kerja tertentu, misalnya kebijakan dan program yang diambil untuk mengatasi masalah setengah penganggur di desa, golongan ekonomi lemah, pemuda, wanita, tenaga kerja penyandang cacat, petani dan nelayan miskin, dan sebagainya.

Melalui kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja ini apabila semua pihak *committed* dan ada sinkronisasi dalam pembangunan, diharapkan masalah terbatasnya kesempatan kerja, terutama bagi wanita, dapat diatasi dengan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja wanita benar-benar berdampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Ini artinya, para pekerja wanita ini akan berdiri sebagai subjek pembangunan dan tidak hanya sebagai objek.

Kesimpulan

Sejalan dengan kemajuan tingkat pendidikan wanita dan semakin terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas bagi wanita, maka partisipasi angkatan kerja wanita dalam pembangunan ekonomi telah meningkat dari waktu ke waktu. Keikutsertaan TKW dalam pembangunan bukan berarti tanpa kendala. Beberapa kendala yang membatasi gerak mereka untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja adalah:

- a. Posisi wanita dalam RT.
- b. Pandangan para pengusaha terhadap TKW.
- c. Pandangan tentang wanita yang masih berkembang di dalam masyarakat.

Masalah TKW yang paling urgen untuk dicarikan pemecahannya adalah rendahnya produktivitas. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan jam kerja angkatan kerja wanita yang masih rendah. Adapun yang mendorong rendahnya tingkat pendidikan dan jam kerja tersebut adalah:

- a. Nilai sosial budaya yang kurang mendorong wanita untuk menuntut pendidikan yang setinggi-tingginya.

- b. Karena fungsinya sebagai ibu rumah tangga, maka wanita lebih senang memperoleh jam kerja yang pendek dalam pekerjaannya.

Walaupun demikian, dalam jangka panjang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan serta tuntutan adanya wanita karier yang didorong oleh gerakan nasional emansipasi wanita yang dicanangkan oleh Ibu Kartini, partisipasi wanita dalam pembangunan ekonomi tentu akan semakin meningkat. Sumbangannya terhadap PDB dalam waktu-waktu mendatang juga akan meningkat. Demikian pula halnya dengan tingkat partisipasinya dalam aneka kegiatan ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dochak Latief. 1990. *Studi tentang Penghasilan Karyawan Golongan I dan II IKIP Yogyakarta*. Laporan Penelitian, IKIP Yogyakarta.
- Erningsih. 1992. "Peranan Tenaga Kerja Wanita dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia". Makalah Seminar di FPIPS IKIP Yogyakarta, 27 Mei.
- Gordon, M.R. 1987. *Long Term Debt for Developing Countries*. World Bank Report No. XVI. Washington DC.
- Harjito Notopuro. 1992. "Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia". Naskah Seminar.
- Hetifah Syaifudin. 1992. "Gender Marginalisasi Pekerjaan di Pedesaan, Wanita Pengusaha, Tenaga Kerja Upahan dan Tenaga Kerja di Jawa Barat". *Warta Studi Perempuan*. Vol. III (2).
- H. Tambunan. 1992. "Peranan Wanita dalam Pembangunan". Makalah Lokakarya.
- Leftwich, R.L. 1957. "Competition Among Workers; A Case Study in Latin America". *Journal of American Economic Review*. XVIII (9).
- Lim Yin An. 1991. "Women Labors, A Problem in Asian Countries". *Asian Wall Street Journal*. Hongkong, November 3.

- Paz, Octavio. 1992. *Claude Levi-Strauss; an introduction*. diterjemahkan oleh Landung Rusyanto Simatupang. Yogyakarta: Citra Yogya.
- Pranowo. 1978. *Ekonomi Pembangunan*. Semarang: Bina Aksara.
- Pranowo. 1992. "Pahlawan Ekonomi, Adalah Dia" KR, Yogyakarta, 10 November.
- Pudjiwati Sajogya. 1978. *Peranan Wanita dalam Pembangunan; Suatu Dasar untuk Melandasi Pembangunan Pertanian*. dikutip oleh Erningsih dalam "Peranan Tenaga Kerja Wanita dalam Pembangunan Ekonomi". Makalah Seminar di FPIPS IKIP Yogyakarta, 27 Mei.
- Sri Budiyanti, dkk. "Peranan Wanita di Berbagai Bidang" Makalah Seminar.
- . 1988. "Strategi Dasar Nasional Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Sampai Tahun 2000". Majalah Kesra, No.7.
- . 1988. *Tap MPR No.II/MPR/1988 tentang GBHN*. Jakarta: Deppen RI.